



SENO

“Kami meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam penanganan aksi massa dan mengedepankan langkah-langkah human sesuai dengan prinsip HAM.”

Atnike Nova Sigiro

Ketua Komnas HAM

Politik & Hukum | Hlm 4

Eskalasi Kekerasan Tuntut Langkah Human

Komnas HAM mendorong Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar menciptakan situasi kondusif dengan melibatkan tokoh-tokoh setempat.

INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

KOMISI Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengajak semua pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan konflik dan kekerasan semakin meluas di wilayah Papua. Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigi, kemarin, berkaitan dengan serangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di 'Bumi Cenderawasih'.

Selain itu, Komnas meminta Kapolda Papua untuk melaku-

kukan proses hukum dalam mengungkap kematian seorang warga sipil dan dua warga yang luka-luka. Itu disampaikan Atnike terkait dengan kabar adanya seorang warga Jayapura, Papua, yang tewas tertembak oleh aparat kepolisian karena diduga menyerang petugas ketika menerobos Bandara Sentani, saat Gubernur Papua Lukas Enembe hendak dibawa ke Jakarta.

Lukas dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK dalam kasus suap dan gratifikasi, Selasa (10/1).

"Kami meminta aparat keamanan untuk tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam penanganan aksi massa dan mengedepankan langkah-langkah human sesuai dengan prinsip HAM," ujarnya.

Komnas HAM, ujar Atnike, berpendapat bahwa eskalasi kekerasan di Papua disebabkan salah satunya penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe. Oleh karena itu, Komnas HAM mendorong Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar menciptakan situasi kondusif dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Masyarakat, imbuhnya, diharapkan tidak menyebarkan informasi provokatif yang akan memunculkan sentimen

negatif sehingga semakin memperkeruh keadaan di Papua. Hal lain yang menjadi sorotan Komnas HAM ialah penanganan pengungsi di Maybrat, Papua Barat.

"Komnas mendukung komitmen Panglima TNI dan Kapolri dalam upaya penyelesaian konflik di wilayah Papua," ujar Atnike.

Menurutnya, perlu adanya koordinasi agar penanganan pengungsi yang terdampak oleh konflik dapat komprehensif, khususnya perhatian terhadap kelompok rentan, anak-anak, manula, perempuan, serta difabel. Komnas HAM berharap pemerintah, TNI dan Polri memastikan pemulangan para pengungsi secara sukarela kembali ke wilayah mereka dengan memberikan jaminan atas rasa aman dan pemenuhan hak-hak

dasar mereka.

Komnas juga mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada penduduk sipil.

Lebih tegas

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memerintahkan aparat keamanan untuk bersikap lebih tegas dalam menangani aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Aparat keamanan TNI-Polri diminta lebih siap di lapangan demi menjaga dan melindungi masyarakat yang tinggal di Papua.

"Itu yang kami minta ke pihak pengamanan. Jadi, tidak dibiarkan begitu, tidak dilepas, tetapi diperketat," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

Ma'ruf mengakui kondisi keamanan di Papua belum kondusif, terutama di sejumlah wilayah di Pegunungan Tengah. Dalam sepekan ini, milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM melakukan setidaknya empat penembakan dan pembakaran di sejumlah wilayah di Papua. (Che/P-2)